

Diskominfotik NTB Ungkap Kondisi Sistem Elektronik dan Jaringan Internet Pemerintah Provinsi

Syafruddin Adi - NTB.WARTAJUSTISIA.COM

Dec 4, 2024 - 09:16



Kepala Dinas Kominfo NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., (03/12/2024)

Mataram, NTB – Kepala Dinas Kominfo NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., membuka Rapat Penyampaian Hasil Visitasi dan Verifikasi Lapangan

Sistem Elektronik dan Jaringan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi NTB 2024, yang berlangsung di Bebek Pondok Galih, Selasa (3/12/2024).

Dalam sambutannya, Dr. Najam memaparkan hasil pendataan sistem elektronik di lingkup Pemprov NTB. Dari 246 sistem elektronik yang terdaftar, sebanyak 174 layanan tercatat aktif, sementara 72 layanan lainnya tidak aktif. Ia menekankan pentingnya memastikan aplikasi dan sistem yang ada memberikan manfaat nyata bagi publik dan mendukung kinerja pemerintah.

"Jangan sampai ada aplikasi tanpa arti, makna, dan manfaat. Digitalisasi dan keamanan siber adalah hal utama yang menjadi perhatian dalam menilai kinerja pemerintah," ujarnya.

Data jaringan internet di lingkup OPD Pemprov NTB mencatat 44 OPD dengan total 158 paket internet, yang melayani 9.166 pengguna melalui 143 koneksi broadband. Sementara itu, layanan elektronik terbagi menjadi 157 layanan publik dan 68 layanan administrasi pemerintahan. Namun, Dr. Najam menyoroti perlunya OPD lebih jelas memilah layanan sesuai jenisnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pengelolaan aplikasi dan layanan digital. "SDM operator harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Dengan peningkatan ini, saya yakin NTB akan semakin baik ke depannya," katanya optimis.

Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfo NTB, Ari Wahyudin, S.Stp., M.M., menambahkan bahwa setelah rapat ini, pihaknya akan melakukan visitasi ke masing-masing OPD. "Kami akan mengecek kondisi layanan secara mendalam untuk memastikan data akurat dan melakukan pembersihan sistem yang tidak aktif, sesuai arahan pusat," jelasnya.

Rapat ini menjadi langkah strategis Pemprov NTB dalam memperkuat tata kelola digital dan meningkatkan pelayanan berbasis elektronik yang lebih efisien dan aman. (Adb)